



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Maret 2021

Halaman: 2

## Pemkot Buka

### Layanan Konsultasi Hukum 'Mbak Ratu'

UMBULHARJO (MERAPI) - Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta membuka layanan konsultasi hukum secara online melalui Mbak Ratu (Masyarakat Terbuka Akses Prosedur dan Aturan Hukum) sejak Maret 2020. Namun hingga kini masyarakat yang mengakses layanan konsultasi hukum itu masih minim. Padahal layanan konsultasi hukum itu diberikan secara gratis bagi masyarakat. "Pelayanan konsultasi hukum secara daring kami lakukan memanfaatkan teknologi informasi tanpa harus bertatap muka. Sayangnya ada pandemi Covid-19 sehingga kami memaksimalkan konsultasi hukum secara daring," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Nindyo Dewanto saat jumpa pers di Balaikota, Selasa (23/3).

Layanan konsultasi hukum secara daring dapat diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) pada menu Mbak Ratu, maupun laman hukum.jogjakota.go.id. Kemudian ikuti arahan lebih lanjut dari menu konsultasi hukum itu. Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta telah membentuk tim yang akan menjawab pertanyaan konsultasi hukum dari masyarakat.

"Misalnya konsultasi hukum terkait pertanahan, pidana, perdata, tata usaha negara ada penanggung

jawab-penanggung jawab tersendiri. Dari sisi SDM kami jauh dari sempurna tapi kami berupaya sebaik mungkin memberikan jawaban permasalahan hukum yang dikonsultasikan masyarakat," terangnya.

Menurutnya dilihat dari tren masyarakat yang mengakses layanan Mbak Ratu masih belum mengembirakan. Rata-rata selama dua minggu sekali, ada pertanyaan konsultasi hukum yang masuk ke Mbak Ratu. Pihaknya tidak bisa memastikan penyebab sepihnya layanan Mbak Ratu. Tapi sebelum ada layanan online itu, Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta telah membuka konsultasi hukum di kantor dan setidaknya sebulan sekali ada masyarakat yang datang.

Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum secara daring Mbak Ratu. Layanan itu juga diberikan secara gratis ke masyarakat terkait permasalahan hukum apapun dapat ditanyakan atau dikonsultasikan lewat Mbak Ratu. Kemudian akan ditindaklanjuti dan jawa-

ban diberikan tidak lebih dari 2 minggu secara daring sesuai akses yang dipilih melalui JSS maupun website.

Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Yogyakarta, Fani menambahkan layanan konsultasi hukum yang diberikan lewat Mbak Ratu berupa memberikan penjelasan terkait aturan dan bagaimana proses hukum dari permasalahan hukum yang dikonsultasikan. Tapi tidak sampai kepada ranah memberikan saran karena Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta bukan pada posisi sebagai konsultan hukum. (Tri)-d

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005